

HEGEMONI MASKULINITAS DALAM POLITIK: Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo

**Jurisman Kadji^{1*}
Mohammad Ihsan Husnan**

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, jurisman@iaingorontalo.ac.id

Abstract: The appearance of women as legislative candidates in the arena of power is an interesting thing. In the implementation of simultaneous elections in 2019. Although there is an increase in the representation of women candidates. But in fact the 30 percent quota in parliament is difficult to fulfill. One of the problems is the bargaining position of female legislative candidates in legislative elections which is still unequal compared to male legislative candidates. The hegemony of men over women does not occur in the private sphere but also in the public sphere. Therefore, the purpose of this study seeks to describe the problem of women's representation in the practice of political representation that occurs in the public sphere, especially at the local political level. In this research, the researcher uses a qualitative method. Meanwhile, data collection is done through data triangulation. The results of existing research show that the problem does not come by itself, but there are internal and external factors in political parties that still place women in a subordinate position to men. Internal party factors, resource capacity, and the influence of patriarchal culture are the dominant factors that hinder the representation of women in the 2019 legislative candidate recruitment process. This happens because political parties are the arena and space for structuralism that is very patriarchal and pragmatic so that hegemonic masculinity in this political representation practice is still well maintained.

Keywords: *Hegemony, Politics, Representation, Women*

Abstrak: Tampilnya perempuan sebagai calon legislatif dalam arena kekuasaan menjadi hal yang menarik. Meski terjadi peningkatan representasi caleg perempuan dalam praktiknya. Namun, faktanya kuota 30 persen di parlemen sulit terpenuhi. Salah satu permasalahannya adalah posisi tawar dari caleg perempuan dalam pemilu legislatif yang masih timpang dibandingkan calon legislatif laki-laki. Hegemoni laki-laki atas perempuan bukan terjadi di ruang privat namun juga di ruang publik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini berupaya menguraikan problem keterwakilan perempuan dalam praktik politik representasi yang terjadi di ranah publik khususnya pada aras politik lokal. Dalam riset ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Sementara untuk pengumpulan data dilakukan melalui Triangulasi data. Hasil riset yang ada menunjukkan problem bukan datang dengan sendiri, melainkan ada faktor internal dan eksternal dalam partai politik yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dari laki-laki. Faktor Internal partai, kapasitas sumber daya, dan pengaruh budaya patriarki menjadi faktor dominan yang menghambat representasi perempuan dalam proses rekrutmen calon legislatif 2019. Hal ini terjadi karena Partai politik menjadi arena dan ruang strukturalisme yang sangat patriarki dan pragmatis sehingga hegemoni maskulinitas dalam praktik politik representasi ini masih mapan dipertahankan.

Kata Kunci: *Hegemoni, Politik, Representasi, Perempuan*

PENDAHULUAN

Tampilnya perempuan sebagai calon legislatif dalam arena kekuasaan menjadi hal yang menarik. Beberapa hasil riset menjelaskan begitu panjang dan sulitnya perempuan tampil dan diterima dalam ruang ini. Kaum perempuan dianggap makhluk yang inferior jauh di bawah laki-laki. Latar belakang historis menjelaskan sejak zaman Yunani, Romawi perempuan bahkan dianggap sebagai sumber dari segala keburukan dan kejahatan. Hal ini kemudian memicu pemberontakan kaum perempuan yang menuntut hak dan kesetaraannya akibat dari penindasan yang dialami selama berabad-abad lamanya. Gerakan politik perempuan ini kemudian menandai lahirnya konsep kesetaraan gender.¹

Representasi perempuan dalam politik memiliki relevansi dengan isu keadilan dan kesetaraan gender. Dalam praktik sosial, kesetaraan Gender sering kali dimaknai sebatas pelibatan perempuan dan laki-laki. Di mana laki-laki secara sosial dikonstruksikan masyarakat lebih unggul dari perempuan. Sementara perempuan dianggap selalu menempati posisi subordinat dari laki-laki. Peran perempuan menjadi urusan terakhir dalam ruang publik. Peran publik yang menyangkut kekuasaan, dan pengaruh menjadi wilayah yang diidentikan dengan maskulinitas laki-laki sementara peran domestik diserahkan kepada perempuan. Konstruksi ini kemudian mengakibatkan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan yang kemudian memicu timbulnya ketidakadilan gender yang merugikan kaum perempuan.²

Isu kesetaraan Gender tidak pernah lepas dari perhatian publik. Tidak terkecuali dalam diskursus politik nasional dan juga politik lokal. Wacana ini masih menarik dan terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Salah satu permasalahan yang serius dan mendapatkan perhatian yang cukup besar adalah tentang keterwakilan perempuan dalam politik dan

¹ Wery Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *Hawa* (2019).

² D Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis," *WASKITA, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 4, no. 2 (2013): 139–154, <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4864>.

pemerintahan. Beberapa terobosan kebijakan perspektif gender terus diupayakan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Salah satunya melalui *affirmative action* bagi perempuan, yakni sebuah kebijakan yang pada intinya menekankan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya menempati 30 persen di parlemen.³

Kebijakan ini dimaksudkan guna mendorong peningkatan partisipasi keterwakilan perempuan dalam politik. Utamanya dalam pemilu legislatif. Meski hal ini bukanlah sebuah proses yang mudah dilakukan. Kehadiran perempuan dalam kontestasi elektoral tentunya menjadi harapan baru dan penting mendapatkan perhatian publik. Hal ini didukung dengan tren peningkatan caleg perempuan pada pemilu serentak tahun 2019 dibandingkan tahun 2014. Data komisi pemilihan Umum (KPU) menunjukkan. Jumlah caleg perempuan pada pemilu 2019 ini mencapai 3.194. Angka ini lebih besar dari pemilu 2014 yakni sebesar 2467 orang. Hal ini menunjukkan peningkatan hampir 50 persen, artinya sudah memenuhi, bahkan melebihi ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilu.⁴ Terjadi peningkatan keterwakilan caleg perempuan dalam pemilu legislatif. Namun demikian, tingginya angka persentase keterwakilan tidak sejalan dengan harapan pemenuhan keterwakilan perempuan di legislatif. Pertanyaan yang muncul kemudian mengapa kuota 30 persen di parlemen tidak bisa terpenuhi.

Beberapa riset menyimpulkan permasalahan yang masih sering muncul adalah posisi tawar dari caleg perempuan dalam pemilu legislatif yang masih timpang dibandingkan calon legislatif laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam konstruksi masyarakat masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki. Ditambah rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik. Keterbatasan kemampuan perempuan dalam politik sangat dipengaruhi problem sosialisasi politik yang berlangsung. Keadaan ini menggiring perempuan untuk mendapatkan status

³ Neni Nuraeni, "Partisipasi Politik Wanita Indonesia Di Parlemen Dan Relevansinya Dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita Dalam Politik," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2019): 119–136.

⁴ [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47734333), "Pemilu: Jumlah Caleg Perempuan Terus Meningkat, Tapi Mengapa Kuota 30% Belum Pernah Tercapai?," BBC NEWS Indonesia, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47734333>.

tertentu tanpa usahanya sendiri (*ascribe status*). Perempuan dengan latar belakang nama besar keluarga dan basis kapital sering kali menjadi pilihan partai ketimbang mereka yang memiliki capaian prestasi (*achieved status*) yang mumpuni.⁵

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dan sistematis dalam menyiapkan kader partai politik yang berkualitas. Partai politik menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan publik dengan Kebijakan Negara. Ini dilakukan melalui peran aktif anggotanya dalam menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat.⁶

Rekrutmen politik yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dan dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Di mana salah satu fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar nantinya dapat menjadi warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik. Meskipun diakui undang-undang ini belum bisa diterapkan secara maksimal.⁷

Representasi perempuan yang memadai dalam lembaga legislatif sangat penting diwujudkan. Pengalaman keterwakilan perempuan yang minim membuat kepentingan kaum perempuan menjadi terabaikan. Kondisi ini bukan datang dengan sendirinya melainkan ada faktor internal dan eksternal dalam partai politik yang ikut mempengaruhinya. Problem ini berlangsung lama. Sehingga tanpa disadari perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dari laki-laki yang kemudian membuat hegemoni maskulinitas dalam politik representasi ini masih mapan dipertahankan hingga saat ini.

⁵ Zaenal Mukarom, "Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2008): 257–270.

⁶ W Gusmansyah, "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam," ... *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* (2019), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2831>.

⁷ Ibid.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan setting alamiah sebagai penciri utamanya.⁸ Sementara itu yang menjadi objeknya adalah orang-orang dan institusi-institusi yang terlibat dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif (Caleg) dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Provinsi Gorontalo. Para informan kunci ini terdiri dari 6 orang caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif (Aleg) dan 10 orang caleg perempuan perwakilan partai politik pada pemilu legislatif di provinsi Gorontalo.

Beberapa fungsionaris partai politik juga dilibatkan utamanya mereka yang mengetahui proses rekrutmen yang dilakukan partai politik. Mengingat masa Pandemi ini banyak akses publik yang dibatasi. Diperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam memilih latar dan setting keadaan yang ada. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan tidak semua informan dapat secara terbuka untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini dapat dimaklumi oleh peneliti mengingat adanya kekhawatiran akan resiko dari informasi yang disampaikan. Apalagi jika hal itu menyangkut kebijakan *elite* partai yang inklusif dan tersentralisasi di kalangan struktur inti partai politik.

Oleh karena itu dalam menganalisis problematika politik representasi perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu serentak 2019 ini. Peneliti menggunakan teknik Triangulasi yaitu sebuah cara pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga nantinya dapat saling menunjang dan melengkapi pemahaman akan persoalan yang diteliti.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan aktivitas perempuan dalam politik memiliki kendala dan tantangan tersendiri. Mulai dari kelembagaan Politik (partai politik itu sendiri), problem Ekonomi, kendala psikologis perempuan. Hingga persoalan kultural dan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, ed. ke-3, Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2012).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interaktif Dan Konstruktif*, ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021).

demografi yang ikut mempengaruhi dinamika sosial masyarakat. Untuk itu, di dalam menguraikan beberapa permasalahan tersebut, perlu disajikan beberapa gambaran sekilas mengenai kondisi demografi dalam setting wilayah penelitian yang dilakukan, baru kemudian dipaparkan mengenai permasalahan penting menyangkut pencalonan dan persoalan representasi perempuan dalam praktik politik yang terjadi.

Setting wilayah Penelitian

Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang berada pada bagian utara pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan dua provinsi lain yaitu, Provinsi Sulawesi tengah dan Sulawesi Utara. Ibu kota provinsi Gorontalo sendiri terletak di kota Gorontalo. Dengan Luas wilayah yakni sebesar 11.257,07 km². Sementara itu, dari sisi administrasi-pemerintahan. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten/kota. Dengan 734 desa/kelurahan yang tersebar di 77 Kecamatan di provinsi Gorontalo.¹⁰ Selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, telah ditetapkan jumlah daerah pemilihan (Dapil) sejumlah 6 dapil dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 45 orang.¹¹

Partai politik sebagai organisasi yang menjadi jembatan informasi antara publik dan pemerintah mempunyai peran yang strategis. Keberadaan para elit politik menjadi bagian penting dalam menentukan kesinambungan program pemerintah di daerah. Mengingat besarnya potensi yang ada. Segala usul dan aspirasi masyarakat akan bisa diimplementasikan dengan baik, apabila seluruh simpul dan stakeholders bersatu.

Dalam perkembangannya berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Tercatat jumlah penduduk di provinsi Gorontalo pada tahun 2019 yaitu. Sebesar 1.202.631

¹⁰ BPS Gorontalo, *Statistik Politik Dan Keamanan Provinsi Gorontalo 2019* (Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo, 2020).

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Gorontalo*, 2018, <https://jdih.kpu.go.id/countkepkpu-5a4e546b5251253344253344>.

jiwa. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk,
menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2019

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
	(Km)	(Jiwa)
Boalemo	1.521,88	167.024
Kab.Gorontalo	1.750,83	378.527
Pohuwato	4.244,31	161.373
Bone Bolango	1.984,31	161.236
Gorontalo utara	1.676,15	115.072
Kota Gorontalo	79,59	219.399
GORONTALO	11.257,07	1.202.631

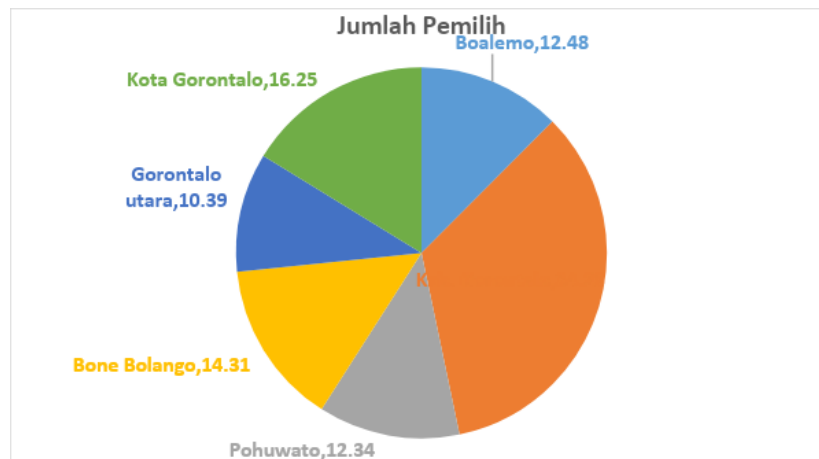
Sumber: Data BPS Provinsi Gorontalo 2020

Kabupaten Gorontalo masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan 5 daerah lainnya. Latar belakang sejarah sebagai daerah induk yang cukup luas dan dulunya merupakan bagian dari Sulawesi utara menjadikan daerah ini sangat potensial bagi perebutan pengaruh elektoral dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pemilih yang ada pelaksanaan pemilu serentak 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu legislatif 2019 sebanyak 812.801 jiwa. Dari angka tersebut sebanyak 721.032 jiwa (88,71 persen) datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, sementara 91.769 jiwa (11,29 Persen) tidak hadir atau golput untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Legislatif.¹²

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, *Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2020* (Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo, 2020).

Gambar 1.

Jumlah penduduk yang menggunakan Hak Pilihnya
Pada Pemilu Legislatif, 2019



Sumber: Data Statistik Politik dan keamanan Provinsi Gorontalo

Jumlah pemilih dalam pemilihan legislatif paling banyak di provinsi Gorontalo berada pada kabupaten Gorontalo yakni sebesar 34,23 persen. Hal ini menyebabkan wilayah kabupaten Gorontalo menjadi medan rivalitas antara masing-masing kandidat utamanya pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan umum legislatif. Dinamika politik yang begitu tinggi secara nasional juga dialami oleh para kontestan politik di provinsi Gorontalo.

Signifikansi Potensi Perempuan

Pelibatan peranan perempuan menjadi indikator berjalannya sebuah proses demokrasi. Meskipun demikian partisipasi perempuan dalam politik pada kenyataannya masih jauh dari harapan. Potensi perempuan sebagai warga negara secara persentase yang lebih banyak dari laki-laki tidak sesuai dengan representasi perempuan di parlemen. Representasi perempuan rata-rata secara nasional masih dibawah 20 persen tak linier dengan indeks demokrasi.¹³

Dalam konteks Provinsi Gorontalo, potensi perempuan yang cukup besar ini juga bisa diidentifikasi melalui jumlah dan komposisi penduduk yang ada. Berdasarkan data yang ada, Jumlah penduduk provinsi Gorontalo mengalami

¹³ A Fithriana and J Annissa, "Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand," *Sawala: Jurnal Administrasi ...*, 2016, <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/237>.

peningkatan sebesar 157,817 jiwa pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2010, yakni sebesar 1.044.814 jiwa. Dengan distribusi jumlah laki-laki 602.436 jiwa dan perempuan sebesar 600.195 jiwa.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo. 2019

Kelompok umur	Jenis kelamin/ Sex		
	Male	Female	Total
Age Group			
0-4	57.738	55.462	113.200
5-9	55.799	53.589	109.388
10-14	54.456	51.597	106.053
15-19	54.238	52.450	106.688
20-24	54.615	54.165	108.780
25-29	51.382	52.029	103.411
30-34	46.009	46.096	92.105
35-39	43.383	44.005	87.388
40-44	42.820	42.752	85.572
45-49	39.331	38.654	77.985
50-54	32.416	32.108	64.524
55-59	24.862	25.385	50.247
60-64	18.510	19.396	37.906
65-69	12.776	13.933	26.709
70-74	7.734	9.349	17.083
75+	6.367	9.225	15.592
Gorontalo	602.436	600.195	1.202.631

Sumber: Data BPS Provinsi Gorontalo 2020

Secara akumulasi jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Namun, jika diteliti lebih jauh jumlah kelompok umur perempuan dengan usia produktif 20 tahun sampai dengan 39 tahun jauh lebih besar daripada jumlah laki-laki. Besarnya jumlah usia produktif perempuan ini tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan kebijakan yang mengarusutamakan gender dalam pembangunan daerah. Selain tentunya adanya potensi perempuan dalam wilayah politik elektoral yang juga patut menjadi pertimbangan dari para elit partai politik

Sementara itu, berdasarkan data KPU Provinsi Gorontalo dari 14 partai yang ikut dalam pemilu legislatif 2019 di tingkat provinsi hanya 10 partai yang berhasil menempatkan para wakilnya di DPRD provinsi Gorontalo. Partai

Golongan Karya masih menjadi partai politik dengan suara terbanyak dengan 10 orang, menyusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 7 orang, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 6 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 orang, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 4 orang yang juga sama dengan Partai Keadilan sejahtera (PKS). Sedangkan Partai amanat Nasional (PAN) dan Demokrat berada di urutan selanjutnya dengan masing-masing menempati 3 orang wakilnya, menyusul kemudian Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 2 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai di urutan terakhir dengan 1 orang wakil di DPRD provinsi.

Tabel 3.
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

Partai Politik	Male	Female	Total
<i>Political Parties</i>			
Partai Golongan Karya (Golkar)	7	3	10
Partai Amanat Sosial (PAN)	3	0	3
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	1	5
partai hati Nurani rakyat (Hanura)	2	-	2
Partai Demokrat	3	-	3
Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	2	7
partai keadilan sejahtera (PKS)	4	-	4
partai kebangkitan bangsa (PKB)	-	1	1
partai gerakan indonesia raya (Gerindra)	2	2	4
Partai Nasional demokrat (Nasdem)	3	3	6
Jumlah	33	12	45

Sumber: Data BPS Provinsi Gorontalo 2020

Dari data diatas diketahui Hasil perolehan suara pemilu legislatif 2019 tersebut juga menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan yang belum mencapai 30% sebagaimana harapan dari representasi perempuan di parlemen. Partai Nasdem dan Golkar tampil dengan 3 orang wakil perempuan menyusul Partai Gerindra dengan 2 orang dan terakhir PPP dan PKB dengan 1 orang perempuan yang sebagai wakil rakyat terpilih pada Pemilu legislatif 2019. Kesemua hal ini menjadi diskursus yang menarik jika dikaitkan dengan bagaimana politik representasi perempuan itu diperankan dalam praktik politik di Indonesia. Utamanya dalam ranah Politik Lokal yang jarang dipaparkan lebih dalam.

Permasalahan Pencalonan Perempuan

Pada dasarnya memang tidak ada regulasi maupun aturan yang mendiskriminasi perempuan ataupun laki-laki untuk ikut serta dalam berpolitik maupun bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan lainnya. Komitmen negara terlihat cukup baik untuk memberikan perlakuan yang adil mengenai hal tersebut. Dari sisi kebijakan politik, Sebagaimana lazim diketahui hak-hak politik telah ada sejak diundangkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 27 yang menyebutkan bahwa “segala warga Negara bersamaan Kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bahkan lebih jauh lagi telah dilakukan ratifikasi terhadap beberapa point penting mengenai aturan tentang penghapusan diskriminasi bagi perempuan sebagai wujud komitmen kehadiran Negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warganya tanpa memandang jenis kelamin.

Namun, harus diakui upaya ini belumlah maksimal terlaksana. Aktivitas perempuan berhubungan erat dengan beberapa faktor hambatan dan kendala bukan hanya politik, namun pula di bidang Ekonomi, sosial, pendidikan dan kultur budaya masyarakat yang ikut mempengaruhi. Oleh karenanya, berbagai cara ditempuh agar perempuan harus selalu aktif berpartisipasi dalam menyuarakan hak politiknya utamanya dalam pengambilan keputusan. Jika hal ini tidak dilakukan maka perempuan akan selalu berada dalam posisi yang rentan hingga sulit memperbaiki kondisinya.

Persoalan ketidakadilan gender seperti, subordinasi laki-laki terhadap perempuan utamanya di ranah pendidikan dan sosial politik membuat perempuan menjadi terbelakang dan tertinggal dari laki-laki. Bentuk subordinasi yang masculine sentris ini menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Mereka sering kali hanya dijadikan objek atau sekedar memenuhi prosedur administrasi dalam bentuk partisipasinya.¹⁴

¹⁴ F L Kollo, “Budaya Patriarki Dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik,” in *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p ...* (Yogyakarta: eprints.uad.ac.id, 2017), <http://eprints.uad.ac.id/9799/1/315-318> Fredik Lambertus Kollo.pdf.

Dalam praktik politik, hal seperti ini terjadi pada rekrutmen calon legislatif (Caleg) perempuan. Adanya ketentuan mengenai kebijakan Affirmative Action membuat setiap partai politik berlomba-lomba menempatkan calon perempuan untuk memenuhi standar ketentuan calon perempuan minimal 30%. Meskipun dijelaskan oleh kalangan partai politik sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan kader perempuan yang berkualitas dan acceptable di masyarakat.

Akibatnya mereka yang ditempatkan menjadi calon umumnya calon eksternal di luar partai. Hanya untuk memenuhi syarat kepesertaan pemilu. Beberapa partai politik dalam temuan peneliti di lapangan mengemukakan alasannya. Tidak banyak perempuan yang mau untuk terjun ke dunia politik. Mereka yang berkualitas enggan untuk masuk di partai politik. Mereka yang memiliki kualitas biasanya sudah mapan dan bekerja pada institusi pemerintah. Selain itu banyak dari mereka yang masih beranggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Hal ini menjadi kendala bagi partai untuk melakukan pencalonan dalam pemilu legislatif 2019. Hal ini dijelaskan oleh seorang informan sebagai caleg dari partai Nasdem.

“waktu itu partai lagi cari figur untuk mengisi kuota perempuan, saya dihubungi diminta sama pak RG untuk bergabung bersama Nasdem, partai politik sudah tahu itu harus ada 30 persen kader perempuan, memang kebanyakan perempuan belum siap untuk terjun ke politik itu karena di Gorontalo ada adat yang laki-lakilah yang senantiasa menjadi pemimpin.”¹⁵

Selain itu, mayoritas mereka para caleg perempuan yang menjadi kader tidak menjadi prioritas partai dalam posisi pencalonan. Sering kali mereka ditempatkan pada nomor urut bawah. Hanya sedikit dari para caleg perempuan ini yang berada pada nomor urut 1. Meski pun dalam pemilu dihitung berdasarkan suara terbanyak namun pada faktanya kecenderungan masyarakat untuk memilih caleg dengan urutan teratas masih cukup tinggi. Mereka merasa dijadikan *Vote Gather*. Namun, ditempatkan pada nomor urut sepele sehingga kemungkinan

¹⁵ Wawancara dilakukan oleh penulis bersama tim terhadap beberapa perempuan anggota DPRD provinsi Gorontalo. Saat pelaksanaan paripurna di DPRD Provinsi Gorontalo. Penulis sendiri berkesempatan mewawancarai ibu Indriani salah seorang caleg perempuan dari partai Nasdem.

untuk terpilih tidak besar dibandingkan mereka yang berada diatas yang umumnya diberikan kepada laki-laki.¹⁶

Keseriusan partai politik dalam menyiapkan para caleg perempuan ini memang Nampak masih sangat rendah. Tidak adanya program yang terencana dengan baik terkait model pendidikan dan pelatihan bagi para kader perempuan membuat para caleg perempuan minim kapasitas dan kemampuan politiknya. Ditambah lagi adanya kecenderungan partai sebagai partai yang *masculine* model dengan laki-laki sebagai patron dan tidak menempatkan pembinaan kader sebagai prioritas membuat peluang para caleg perempuan menjadi *inferior* untuk mampu bersaing dengan kaum laki-laki.

Kita mengikuti aturan pusat, tidak ada mekanisme khusus, partai tidak punya kesepakatan khusus semuanya mengikuti aturan formal yang ada. Kita ada sayap organisasi khusus perempuan, Untuk bisa aktif di partai mereka berkompromi disitu dilatih agar bisa berpartisipasi di partai. Semacam sekolah politiknya.¹⁷

Kondisi partai yang sangat masculine ini membuat dominasi laki-laki menjadi sangat besar. Sehingga segala kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan perempuan tidak terakomodir dengan baik. Struktur inti partai di dominasi oleh laki-laki sementara perempuan hanyalah melengkapi kekosongan struktur yang ada. Begitu juga dengan kesempatan yang diberikan bagi perempuan didalam mengembangkan dirinya pun sangat sedikit dilakukan. Sayap organisasi perempuan dalam partai tidak bisa berperan lebih besar, dikarenakan secara kuantitas dan kualitas tidaklah memadai.

Beberapa caleg perempuan yang diwawancarai oleh peneliti bahkan tidak mengetahui nama dan keberadaan sayap organisasi khusus perempuan tersebut. Hal ini menunjukkan, tidak berfungsinya sistem kaderisasi yang baik di dalam partai politik. Akibatnya merekrut calon eksternal yang potensial dengan kemampuan finansial memadai menjadi pilihan rasional bagi partai politik

¹⁶ Irwan Abdullah, “Politisasi Gender Dan Hak-Hak Perempuan Kendala Struktural Keterlibatan Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif,” *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2016): 277–290, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1016>.

¹⁷ Penjelasan ini diuraikan salah satu caleg dari GOLKAR Meike yang menjelaskan proses pelibatan perempuan dalam partai politik.

ketimbang “berkeringat” melakukan kaderisasi yang terencana dan terpola dengan baik.

Representasi Perempuan dalam Politik

Untuk menganalisis keterwakilan perempuan di ranah politik ini peneliti perlu menjelaskan beberapa gambaran penting terkait beberapa modus representasi yang menjadi acuan peneliti di dalam mengamati fenomena keterwakilan perempuan dalam praktik politik. Khususnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Gorontalo, yang dalam pandangan Hanna Fenichel Pitkin dapat dibagi kedalam beberapa bentuk representasi politik yakni: 1) Representasi Formal menyangkut deskriptif karakteristik demografi. 2) Representasi substansi menyangkut pemahaman representasi terkait yang diwakili, dan yang terakhir 3) Representasi Simbolis yakni menghadirkan dengan mempresentasikannya, meskipun sesuatu tidak ada.¹⁸

Selanjutnya, di dalam riset ini peneliti juga berupaya menampilkan beberapa data kuantitatif untuk menggambarkan kondisi dan karakteristik demografi para calon anggota legislatif mulai dari karakteristik keterwakilan perempuan berdasarkan daerah pemilihan (Dapil), Partai Politik, hingga distribusi representasi caleg perempuan yang terpilih di DPRD provinsi Gorontalo. Agar nantinya pembahasan mengenai problematika keterwakilan politik perempuan ini bisa disajikan lebih variatif dan menarik. Sebagai bahan pertimbangan peneliti menggunakan beberapa kerangka teoritis tersebut untuk menjadi pisau analisis peneliti di dalam menggambarkan fenomena elektoral terkait praktik representasi politik perempuan yang berlaku dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti.

Representasi Formal

Usaha untuk meningkatkan representasi Politik perempuan di parlemen telah cukup lama diupayakan. Bahkan semenjak awal Pemilu dilaksanakan, utamanya saat pemilihan langsung 2004 melalui Pemberlakuan kebijakan *affirmative action*. Namun demikian setiap periode politik ini dijalankan, peran

¹⁸ Representasi Politik et al., “Women ’ s Political Representation i n Legislative Institutions (A Study of Women ’ s Candidacy in the 2019 Legislative Election)” 09, no. 2 (2021): 203–28.

politik dan keterwakilan perempuan tidak serta merta terus meningkat. Banyak faktor yang menjadi kendala dan hambatan keterwakilannya. Utamanya pada konteks pemilu lokal yang dilaksanakan di setiap daerah.

Pembentukan daerah pemilihan (Dapil) dalam Pemilu Legislatif merupakan hal yang penting dalam proses elektoral praktik politik kita. Penentuan Dapil dianggap sebagai arena awal dalam ajang kompetisi para calon legislatif (Caleg) untuk tampil sebagai pemenang yang nantinya duduk di parlemen. Dalam konteks pelaksanaan pemilu langsung pertama 2004, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu masih memiliki kewenangan atas pembentukan dapil, mulai dari tingkat nasional DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kota/ kabupaten.

Namun demikian pasca UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu disahkan, kewenangan Pembentukan Dapil yang pada pemilu 2009 dan 2014 masih diberikan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian telah dipersempit dengan hanya dapat membentuk dapil di DPRD kabupaten/kota. Pembentukan dapil DPR RI dan DPRD Provinsi ini masuk dalam Lampiran Undang-Undang. Artinya kewenangan KPU ini telah di ambil oleh pembentuk undang-undang sendiri. Berikut ini adalah jumlah Anggota DPRD provinsi Gorontalo menurut dapil dan jenis kelamin 2019.

Tabel. 4. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin, 2019.

Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin		
	L	P	Jumlah
Gorontalo I	6	2	8
Gorontalo II	4	2	6
Gorontalo III	7	2	9
Gorontalo IV	5	1	6
Gorontalo V	4	1	5
Gorontalo VI	7	4	11
Total	33	12	45

Sumber: Data Sekunder 2020

Di provinsi Gorontalo sendiri, diketahui terdapat enam Dapil yang ditetapkan sebagai daerah perebutan pengaruh dan simpati publik. Masing-masing Dapil memiliki karakteristik tersendiri. Para calon anggota legislatif sebagai

kontestan memiliki cara dan strategi tersendiri di dalam memaksimalkan pengaruhnya, tak terkecuali mereka para caleg perempuan yang juga ikut dan kemudian terpilih dalam Pemilihan legislatif 2019 yang lalu. Berikut ini gambaran beberapa distribusi caleg perempuan berdasarkan daerah pemilihan yang peneliti peroleh dari data KPU provinsi Gorontalo.

Tabel. 5

Jumlah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Pemilihan Gorontalo I

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PKB	-	-	0
2	GERINDRA	5	3	8
3	PDIP	5	3	8
4	GOLKAR	4	4	8
5	NASDEM	5	3	8
6	BERKARYA	1	2	3
7	PKS	5	3	8
8	PERINDO	3	4	7
9	PAN	5	3	8
10	PPP	5	3	8
11	PSI	2	1	3
12	HANURA	5	3	8
13	DEMOKRAT	5	3	8
14	PBB	2	1	3
	Total	52	36	88

Sumber: Data Sekunder 2020

Berdasarkan data diatas, untuk Daerah pemilihan Gorontalo I yakni daerah Kota Gorontalo. Terlihat distribusi caleg perempuan paling banyak proporsinya yakni pada partai Golkar dan Perindo dengan masing-masing 4 orang caleg disusul, gerindra, PDIP, Nasdem, PKS, PAN, PPP, Hanura dan Demokrat. Sementara PKB tidak sama sekali mengusulkan calonnya. Sebagai daerah dengan persentase jumlah pemilih paling besar dibandingkan dapil lain. Daerah kota Gorontalo merupakan arena kontestasi yang cukup alot bagi para caleg perempuan. Di samping harus bersaing dengan para kandidat partai yang lain mereka pula harus bersaing dengan beberapa nama besar calon legislatif di internal partai yang umumnya adalah laki-laki seperti Fikram Salilama, di Golkar,

dan Adhan Dambea di PAN. Dengan popularitas dan elektabilitas yang juga cukup tinggi.

Sementara itu, untuk daerah pemilihan Gorontalo II.III. IV, V, VI. Distribusi caleg perempuan di setiap partai hampir sama. Rata-rata partai politik hanya mengusulkan 2 sampai dengan 3 orang caleg perempuan. Hanya satu partai yang mencalonkan 4 orang caleg perempuannya, yakni partai Keadilan Sejahtera. Pada dapil 2 terdapat dua partai yang sama sekali tidak mengusulkan calon legislatif, yaitu partai PKB dan PSI. Dua partai ini memilih absent dari dapil ini yakni kabupaten Bone-Bolango. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan caleg potensial yang diakui oleh partai politik. Kalau pun ada, umumnya memilih partai-partai besar yang selama ini mendominasi dapil ini seperti NASDEM, GOLKAR, PPP.PDIP.

. Hal yang menarik dicermati yakni pada daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo III adalah partai Golkar sebagai partai yang cukup dominan dengan kader-kadernya hanya mencalonkan 7 orang caleg dengan distribusi caleg perempuan lebih dari 30%. Sebagai partai besar tentu ini adalah pilihan antimainstream yang berbeda dengan partai lain. Golkar yang selama ini sangat mendominasi politik elektoral di daerah menjadi salah satu partai dengan pengusung caleg perempuan terbanyak bersama PKS, PAN, dan HANURA

Representasi Simbolik

Konsep representasi simbol pada dasarnya terkait penggunaan simbol-simbol sebagai sarana dalam merepresentasikan sebuah objek tertentu. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana penyampaian aspirasi, pesan, dan hasrat. Pesan ini tidak diaktualisasikan secara gamblang. Namun ditampilkan dalam wujud berbeda atau tidak nyata dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap objek yang dimaksud. Dalam konteks politik, simbol dapat diartikan sebagai pola konfigurasi ideologi perjuangan yang mengarahkan individu untuk mengikuti perilaku politik sesuai dengan apa yang diinginkan.¹⁹

¹⁹ Nila Sastrawati, "Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 168, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1499>.

Oleh sebab itu dalam pandangan Pitkin²⁰ Representasi Simbolis yakni menghadirkan dengan mempresentasikannya, meskipun sesuatu tidak ada. Simbolisme politik ini dapat diamati dalam relasi sosial yang terjadi di masyarakat. Simbol yang dihadirkan digunakan untuk mengarahkan atau menggiring individu maupun kelompok untuk bertindak sesuai dengan tujuan dari simbol yang dihadirkan. Dalam konteks politik praktik simbol ini sering dikaitkan dengan politik pencitraan. Misalnya partai politik dicitrakan sebagai partai yang memperjuangkan dan mengakomodir kepentingan perempuan namun sesungguhnya malah sebaliknya. Riset ini menemukan bagaimana penggunaan simbol ini digunakan untuk menggiring dan memenuhi kepentingan elektoral semata terkait representasi perempuan.

Dalam proses pencalonan legislatif yang diusung, keterlibatan perempuan, hanyalah sekedar memenuhi ketentuan undang-undang yang mensyaratkan sejumlah 30 persen dalam pencalonan. Selain itu, dalam proses pencalonan yang dilakukan, partai politik lebih melihat pada kapasitas Pendanaan yang dimiliki. Kapasitas para caleg dilihat dari berapa banyak modal yang digunakan dalam kemenangan, bukan kapasitas sumber daya, dan pengetahuan politik yang digunakan dalam mendominasi efek electoral. Akibatnya, keberadaan caleg perempuan yang nir Modal pendanaan menjadi termarjinalkan. Apalagi jika partai politik pengusung adalah jajaran partai besar yang selama ini mendominasi praktik elektoral lima tahunan ini. Partai politik ini bermain pada relasi oligarki yang ada, caleg perempuan yang diusung merupakan bagian dari dinasti elit politik lokal yang ada.

Penggunaan simbol-simbol yang bernuansa politik menjadi sebuah entitas dalam praktik politik elektoral. Simbol-simbol ini tak dapat dipisahkan dengan standar-standar, motif juga kepentingan politik yang sangat beragam variasinya. Oleh karena itu simbolisme menggiring setiap aktivitas sosial pada situasi relasi kemasyarakatan pada standar ganda. Pada satu sisi dapat digunakan guna proses

²⁰ Dayur Sundari, *Representasi" Perempuan" Di Dprd Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2019* (repository.unair.ac.id, 2019), [https://repository.unair.ac.id/84170/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/84170/5/JURNAL_Fis.P.3219 Sun r.pdf](https://repository.unair.ac.id/84170/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/84170/5/JURNAL_Fis.P.3219%20Sun%20r.pdf).

harmonisasi di masyarakat namun disisi lain digunakan untuk memperoleh pengaruh kekuasaan melalui simbol yang ada.

Representasi Substansi

Dalam praktiknya, keberadaan perempuan dalam ranah politik semata-mata tidak hanya terkait kehadiran fisik dan permainan simbol yang ada. Melainkan sejauh mana ide, gagasan dan keberpihakannya terhadap kepentingan publik, utamanya kaum perempuan juga ikut terwakili. Tantangan yang dihadapi kelompok perempuan sangatlah besar. Kaum perempuan harus mampu meyakinkan publik, bagaimana keterwakilan perempuan yang ada bisa benar-benar dimaknai sebagai representasi yang secara substansi hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat. Representasi substansi dipahami sebagai pelimpahan keterwakilan satu pihak kepihak yang lain dan dilaksanakan dengan tanggung jawab²¹.

Keterwakilan perempuan ini bukan hanya secara kuantitas namun pula ditunjang dengan peningkatan kualitas. Hal ini menjadi intisari agar kepentingan perempuan dalam agenda setting kebijakan publik bisa terakomodir. Misalnya saja mengenai isu sosial yang terkait dengan keadilan dan ketimpangan gender yang terjadi. Publik menilai peran partai politik masih sangat minim. Para kandidat perempuan yang diusung partai politik dinilai minim kapasitas. Mereka yang tampil tidak menguasai persoalan pokok yang ada di ranah lokal apalagi nasional. Peningkatan jumlah keterwakilan caleg perempuan parlemen tidak menjamin aspirasi kaum perempuan bisa terakomodir. Beberapa temuan peneliti mengkonfirmasi bahwa kapasitas sumber daya menjadi inti problem representasi perempuan parlemen. Para caleg yang ada masih lemah dalam menyikapi berbagai kasus yang menyangkut persoalan perempuan. Misalnya saja kekerasan terhadap perempuan dan perjuangan kepentingan perempuan (kesehatan, pendidikan) dan isu strategis lainnya.

Hal ini terjadi karena fungsi partai sebagai tempat penyiapan kader tidak dilaksanakan dengan baik. Bagaimana mungkin para perempuan bisa menjalankan

²¹ Nurul Asnawiah and Titin Purwaningsih, "Representasi Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019," *Jurnal Caraka Prabhu* 4, no. 1 (2020): 69–98, <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.216>.

fungsi legislasinya apabila mereka tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Utamanya menyangkut isu publik yang menyangkut persoalan kepentingan perempuan yang memang sering kali belum terakomodir. Oleh sebab itu, partai politik perlu menyiapkan program dan pembinaan kader yang terencana guna peningkatan kapasitas perempuan dalam partai politik yang lebih baik kedepannya.

Hambatan Representasi Perempuan

Problem Internal Partai

Dalam penelitian ini tentunya ketika melihat keterwakilan perempuan di parlemen secara umum salah satu variabel yang wajib dilihat adalah, rumah besar partai politik. Kita ketahui bahwa; partai politik adalah ruang strukturalisme yang sangat pragmatis dewasa ini. Konstruksi tersebut yang membuat masalah keterlibatan perempuan berpengaruh secara signifikan dalam ruang-ruang politik, baik itu di tingkat nasional maupun lokal.

Ruang pragmatism itu seperti, tidak adanya proses kaderisasi dalam tubuh partai politik secara ketat. Apalagi yang ada di daerah-daerah. Pada locus penelitian ini misalnya; calon-calon yang didukung tidak memahami secara lengkap seperti apa visi dan misi partai politik. Mereka pada umumnya hanya mengetahui tiga fungsi legislatif dalam hal pengawasan, anggaran dan pembuatan undang-undang. Fungsi umum yang harusnya disuarakan dengan agenda dasar perjuangan dari masing-masing partai politik. Selain itu, para calon anggota legislatif yang diusung, khususnya keterlibatan perempuan, hanya sebagai pelengkap ketentuan dari undang-undang yang mensyaratkan sejumlah 30% dalam keterlibatan pencalonan. Hal ini jelas tidak menyentuh substansi mengapa perempuan harus mendapat tempat yang layak dalam kancah percaturan politik.

Namun, partai seperti Nasdem dalam hal ini secara umum telah menyiapkan organisasi partai seperti Garda Wanita Nasdem (GARNITA) yang dalam hasil wawancara memang mengkader anggotanya untuk kemudian menunjuk untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Diikuti pula dengan beberapa partai lain yang sudah mulai merintis organisasi ini. Secara factual hal ini memang baik, khususnya untuk menaikkan partisipasi wanita dalam partai

politik. Hanya, ruang ini haruslah diikuti dengan pembekalan secara ketat terutama pada visi dan misi partai.

Berikutnya, secara internal persoalan pendanaan partai politik menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Dengan porsi dana negara yang diatur dalam undang-undang tidak cukup untuk mendanai segala kegiatan partai politik, apalagi pengkaderan yang dimulai dengan pendidikan dan pelatihan. Dari hasil temuan memang kader-kader yang dimasukkan dalam kontestasi pemilu harus berkampanye dengan menggunakan dana pribadi.

Oleh karena itu kader-kader yang nekat maju dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif adalah orang-orang yang telah mapan secara ekonomi, diantara dari mereka bahkan tercatat sebagai pengusaha dan kerabat dekat kekuasaan. Dari hasil temuan peneliti terlihat memang kader-kader perempuan yang tampil adalah mereka yang punya modal uang cukup banyak untuk bertarung dalam kontestasi. Dari Golkar misalnya, sebagai istri dari seorang komisaris bank daerah yang juga politisi tentu membuat langkah yang bersangkutan cukup terbuka lebar duduk dibangku legislative. Kemudian dari Nasdem, sosok wanita yang duduk adalah istri dari salah satu bupati di Gorontalo, yang juga berasal dari keluarga penguasa kaya di Gorontalo. Tingginya ongkos demokrasi dan secara internal partai tidak cukup kuat untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional membuat benteng eksklusifitas dalam hal pemilihan kader-kader yang siap maju dalam kontestasi Pemilu.

Dari dua masalah krusial dalam tubuh internal partai tersebut, sebagai konklusi berujung pada kinerja kader di lembaga legislatif kurang maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan pada pemerintah. Kemiskinan di Gorontalo misalnya, kurang lebih hamper 8 tahun terakhir daerah ini masih ada di urutan ke 5 daerah termiskin di Indonesia. Dengan hasil statistik ini bisa dilihat bahwa pengawasan yang maksimal untuk kerja-kerja pengentasan kemiskinan tidak terlaksana secara maksimal.

Kapasitas Sumber Daya

Dari hasil penelitian ini , didapati semacam kapasitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya punya pengetahuan yang cukup tentang partai

politik dan posisi politik. Hal ini memang telah dibahas diatas, tetapi dalam hal ini sumber daya partai yang ditemukan memang mengalami defisit yang cukup rendah. Apalagi ketika calon perempuan yang akan diusung untuk menduduki posisi tersebut. Dari penjelasan diatas pula, organisasi sayap yang khusus ditempati oleh kaum perempuan masih sangat minim, apalagi ketika diperhadapkan tentang keahlian dan pengetahuan tentang politik. Sejauh ini sumber daya diukur hanya berapa banyak modal yang akan digelontorkan untuk pemenangan, bukan sejauh mana strategi yang akan dimainkan dalam mendominasi efek electoral.

Dari perspektif tersebut, eksistensi partai hanya akan berkuat pada relasi oligarki yang ada, apakah sang calon bagian dari keluarga elit politik utama yang tentunya menguasai posisi-posisi penting di daerah. Fenomena lainnya juga, calon yang punya relasi oligarki biasanya ketika terpilih akan ikut bersama-sama elit politik utama untuk kampanye dengan menggunakan program-program pemerintah daerah. Hal ini banyak terlihat ketika pemberian bantuan sosial diikuti dengan salah anggota DPR RI yang juga sebagai istri salah satu kepala daerah di Gorontalo. Tentunya targetnya jelas, yakni untuk posisi politik selanjutnya.

Uraian ini yang membuat kapasitas sumber daya manusia pada partai khusus dalam penelitian ini memang menjadi masalah karena tidak proporsionalnya jumlah kader wanita yang benar-benar melewati tahapan pelatihan sebagai kader partai tertentu yang berikutnya adalah sumber daya yang banyak digunakan hanya pembicaraan jumlah modal yang akan digunakan, bukan pada substansi isi dari visi misi partai politik

Pengaruh Budaya Patriarki

Ruang budaya patriarki menjadi salah satu temuan dari hasil riset ini. Secara kultural memang dominasi laki-laki dalam politik lokal sangat kental. Misalnya dari awal Gorontalo menjadi Provinsi , jabatan kepala daerah tingkat I maupun tingkat II belum ada yang diisi oleh kaum wanita. Padahal banyak tokoh-tokoh wanita di Gorontalo yang punya potensi yang mumpuni secara keilmuan untuk menduduki posisi strategis tersebut. hal ini tentu berdampak pada ruang politik di level legislative, yang juga awalnya didominasi oleh kaum laki-laki.

Oleh karena sekarang ketentuan regulasi dan kampanye atas kesetaraan gender tengah dipromosikan secara massif akhirnya partai kini membuka peluang agar kaum perempuan bisa turut aktif dalam kontestasi politik di berbagai tingkatan.

Di Gorontalo kini, partai-partai tengah membuka pendaftaran bagi kaum wanita untuk tampil sebagai kader-kader profesional, terbukti dengan adanya para kaum hawa menempati kursi di DPR RI, DPRD Provinsi hingga Kabupaten/Kota. hanya saja memang pengetahuan substansi tentang partai politik dan jabatan legislative belum sepenuhnya mereka kuasai. Apalagi sebagian dari mereka terpilih karena ada nama besar yang notabene adalah elit partai politik, sehingga yang terjadi adalah fenomena oligarki dalam tubuh partai politik.

KESIMPULAN

Pada praktiknya, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinasi dari laki-laki, terbelakang dan tertinggal. Bentuk subordinasi yang masculine sentris ini menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan terjadi. Beberapa temuan penting sebagaimana tujuan penelitian yang ditegaskan di awal Bab, menguraikan bahwa bentuk pengabaian yang terjadi membuat perempuan menjadi pihak yang sering kali dirugikan dalam event elektoral ini. Mereka menjadi objek atau sekedar memenuhi prosedur administrasi dalam bentuk partisipasinya.

Dari data yang ada menunjukkan sebanyak 12 orang Perempuan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang secara keseluruhan belum mencapai 30% seperti apa yang diamanahkan dalam undang-undang. Beberapa temuan mengenai problematika perempuan dalam politik representasi ini coba penulis simpulkan sebagai berikut:

Pertama, Keseriusan partai politik dalam menyiapkan para caleg perempuan Nampak masih sangat rendah. Tidak adanya program yang terencana dengan baik terkait model pendidikan dan pelatihan bagi para kader perempuan membuat para caleg perempuan minim kapasitas dan kemampuan politiknya. Kecenderungan yang ada dalam partai sebagai partai yang masculine model dengan laki-laki sebagai patron. selain itu terlihat partai tidak menempatkan pembinaan kader sebagai prioritas sehingga membuat peluang para caleg

perempuan menjadi inferior untuk mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Kondisi partai yang sangat masculine ini membuat dominasi laki-laki menjadi sangat besar. Sehingga segala kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan perempuan tidak terakomodir dengan baik.

Kedua, Struktur inti partai di dominasi oleh laki-laki sementara perempuan hanyalah melengkapi kekosongan struktur yang ada. Begitu juga dengan kesempatan yang diberikan bagi perempuan didalam mengembangkan dirinya pun sangat sedikit dilakukan. Sayap organisasi perempuan dalam partai tidak bisa berperan lebih besar, dikarenakan secara kuantitas dan kualitas tidaklah memadai.

Ketiga, mayoritas mereka para caleg perempuan yang menjadi kader tidak menjadi prioritas partai dalam posisi pencalonan. Sering kali mereka ditempatkan pada nomor urut bawah. Hanya sedikit dari para caleg perempuan ini yang berada pada nomor urut satu. Meski pun dalam pemilu dihitung berdasarkan suara terbanyak namun pada faktanya kecenderungan masyarakat untuk memilih caleg dengan urutan teratas masih cukup tinggi. Mereka merasa dijadikan Vote Gather namun ditempatkan pada nomor urut sepatu sehingga kemungkinan untuk terpilih tidak besar dibandingkan mereka yang berada diatas yang umumnya diberikan kepada laki-laki.

Keempat, dari sisi faktor yang menghambat dapat disimpulkan; Problem Internal partai, kapasitas sumber daya, dan pengaruh budaya patriarki menjadi faktor dominan yang menjadi hambatan representasi perempuan dalam politik. utamanya terkait dengan proses rekrutmen calon legislatif 2019. Hal ini terjadi karena Partai politik menjadi arena dan ruang strukturalisme yang sangat pragmatis. Problem ini ditandai dengan tidak adanya proses kaderisasi yang ketat sehingga calon-calon yang didukung bisa memahami secara lengkap seperti apa visi dan misi partai politik yang seharusnya seirama dan disuarakan dengan agenda dasar perjuangan dari masing-masing partai.

Selanjutnya, kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih relatif rendah. Para perempuan belum sepenuhnya memahami dan memiliki pengetahuan politik yang memadai. Kemampuan sumber daya sejauh ini hanya diukur dari berapa banyak modal ekonomi dan materi yang Akan digunakan untuk pemenangan

bukan sejauh mana strategi dan modal sosial yang akan dimainkan dalam mendominasi efek electoral. Defisit pengetahuan ini diperparah dengan relasi oligarki dengan partai sehingga membuat kader perempuan yang nir relasi akan terpinggirkan.

Hal ini tampak dari struktur kekerabatan di partai politik yang membuat partai semakin oligarki dan kental dengan nuansa dinasti politik. Meski merupakan kader inti yang lama membangun dan membesarkan partai. Mereka yang nir relasi ini semakin tipis dan tertutup peluangnya untuk tampil dalam kontestasi politik. Hambatan ini akan semakin diperparah dengan *stereotype* yang berkembang di publik tentang budaya patriarki masyarakat yang pada akhirnya selalu menempatkan politik sebagai wilayah masculin bagi laki-laki dan bukan merupakan urusan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawiah, Nurul, and Titin Purwaningsih. "Representasi Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019." *Jurnal Caraka Prabhu* 4, no. 1 (2020): 69–98. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.216>.
- bbc.com. "Pemilu: Jumlah Caleg Perempuan Terus Meningkat, Tapi Mengapa Kuota 30% Belum Pernah Tercapai?" BBC NEWS Indonesia, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47734333>.
- BPS Gorontalo. *Statistik Politik Dan Keamanan Provinsi Gorontalo 2019*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo, 2020.
- Ekawati, E. "Peta Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru." ... *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of ...*, 2019. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/2680>.
- Fithriana, A, and J Annissa. "Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand." *Sawala: Jurnal Administrasi ...*, 2016. <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/237>.
- Gorontalo, Badan Pusat Statistik Provinsi. *Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2020*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo, 2020.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penetapan Daerah Pemilihan dan

Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo (2018). <https://jdih.kpu.go.id/countkepkpu-5a4e546b5251253344253344>.

Mar'iyah, Chusnul. "Pemilihan Umum, Partai Politik Dan Demokrasi: Antara Tafsir Konstitusi Dan Praktik Politik." *Jurnal Ketatanegaraan* 005 (2017): 91–128.

Mkri. "MK: Mulai 2019, Pilpres Dan Pileg Serentak." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9520>.

Politik, Representasi, Perempuan Pada, Lembaga Legislatif, and Studi Tentang. "Women ' s Political Representation i n Legislative Institutions (A Study of Women ' s Candidacy in the 2019 Legislative Election)" 09, no. 2 (2021): 203–28.

Putri, Masleka Pratama. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di." *Ejournal.Iikom.Fisip-Unmul.Ac.Id*, 2015.

Ramadhanil, Fadli, Heroik M Pratama, Nurul Amalia Salabi, and Usep Hasan Sadikin. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Renaissance*. Vol. 4. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2019. <http://ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/92>.

Sastrawati, Nila. "Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 168. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1499>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Ke-3. Bandung: Alfabeta, 2021.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Edited by ke-3. Ke-3. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sundari, Dayur. *Representasi" Perempuan Politisi" Di Dprd Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2019*. repository.unair.ac.id, 2019. [https://repository.unair.ac.id/84170/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/84170/5/JURNAL_Fis.P.32 19 Sun r.pdf](https://repository.unair.ac.id/84170/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/84170/5/JURNAL_Fis.P.32%2019%20Sun%20r.pdf).